

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk BPBD Kabupaten Sambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam upaya menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2024 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024.

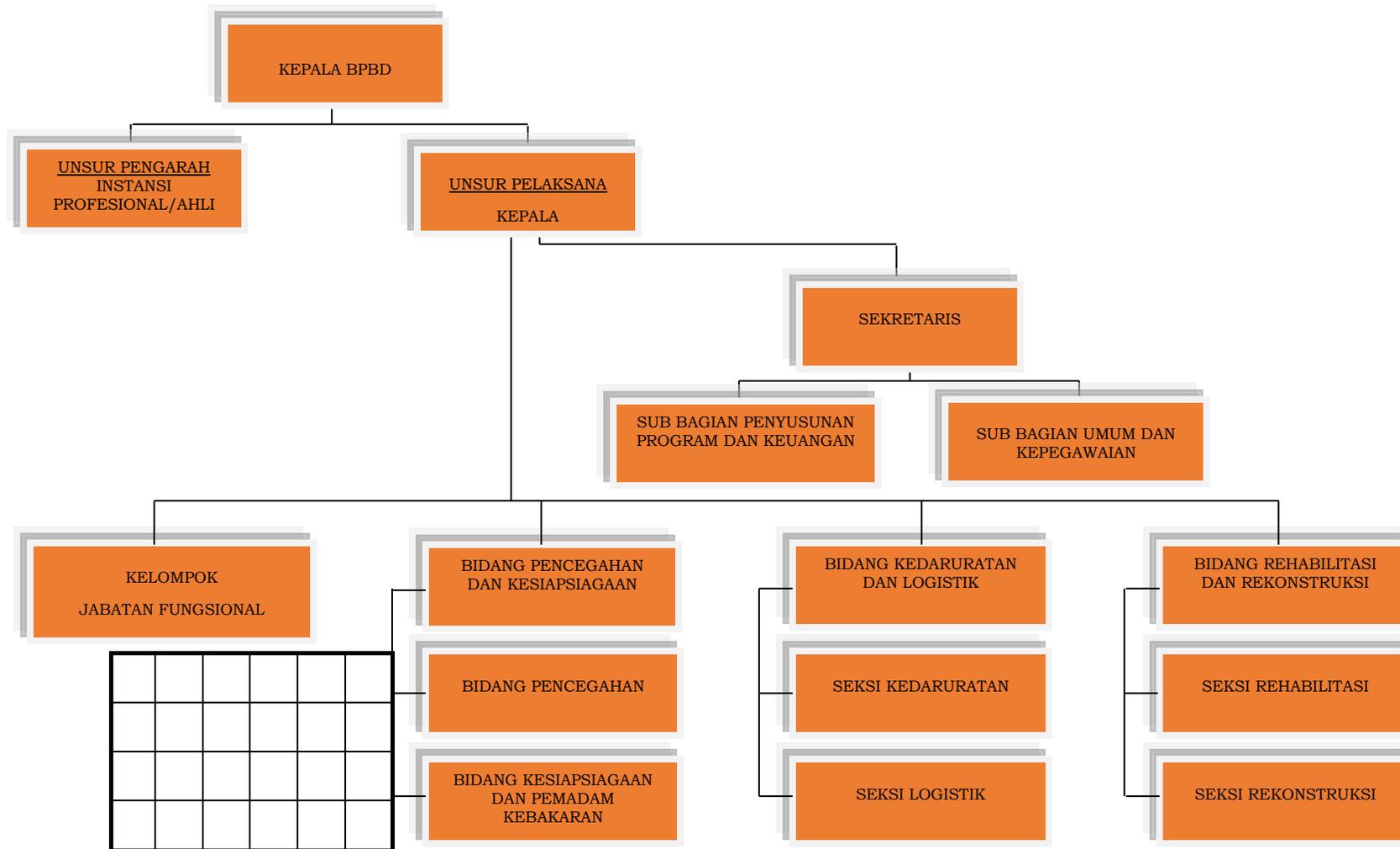
2. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tersebut, Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, meliputi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran, meliputi :
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi :
 - Seksi Kedaruratan
 - Seksi Logistik
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :
 - Seksi Rehabilitasi
 - Seksi Rekonstruksi
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir dalam Dokumen Laporan Kinerja ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS**



3. Tugas Pokok dan Fungsi

BPBD Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem dalam susunan perangkat daerah, BPBD Kabupaten Sambas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran. BPBD Kabupaten Sambas dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sehari-hari, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi bidang sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas, maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Sambas di dukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 28 (dua puluh Delapan) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan tenaga honorer sebanyak 11 (sebelas) orang.

Tabel. 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
per 31 Desember 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5
1	MARJUNI, S.H 19680612 199710 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pelaksana	S1
2	YOELYANTO, S.T.M.T 19720124 200312 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S2
3	NISA AZWARITA, S.E 19730427 200212 2 005	Pembina (IV/a)	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S1
4	AZIS JANUARDI, S.H, M. Si 19730101 200701 1 058	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1
5	AS'ADI, S.T, M. Si 19760313 200502 1 002	Pembina (IV/a)	Kasi Kedaruratan	S2
6	Ir. SURIADI 19680815 200212 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Rehabilitasi	S1
7	RAMADANSYAH. R, SE 19760919 199603 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rekonstruksi	S1
8	ANTON SUHERI, SP 19690712 200604 1 012	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
9	NANANG MARDIANTO, SP 19750208 200604 1 010	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	S1
10	AMIRUDDIN, SP 19770419 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pencegahan	S1
11	KHALILULLAH, A. Md 19701003 199603 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Logistik	Diploma
12	NURHADI, S. H 19861116 201001 1 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S1
13	NOPITA, S.T 19910319 201902 1 008	Penata Muda (III/a)	Analisis Konservasi Kawasan	S1
14	IMIELDA RISA, S. Sos 19930206 201902 2 007	Penata Muda (III/a)	Analisis Mitigasi Bencana	S1
15	HERMAN 19760220 200604 1 0013	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Umum	SLTA
16	BUDI KASIH 19810705 200801 1 014	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SLTA
17	HARIYANTO, S.E 19820717 200701 1 011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penegelola Data Pencegahan dan Monitoring	S1
18	MUHAMMAD HAZIQ, S. Sos	-	Tenaga Honorer	S1
19	ERVINA PUSPITASARI, S. Pd	-	Tenaga Honorer	S1

20	FARID, SP	-	Tenaga Honorer	S1
21	NAZAHARI, S. Pd	-	Tenaga Honorer	S1
22	IRWAN HIDAYAT, SH	-	Tenaga Honorer	S1
23	PORMAN SAPUTRA, SP	-	Tenaga Honorer	S1
24	LATIFAH, SE	-	Tenaga Honorer	S1
25	MEIDI MUHANDIKA, S. Tr. T	-	Tenaga Honorer	DIV
26	DITA AYUNINGTYAS, A.Md.Keb	-	Tenaga Honorer	Diploma
27	SANTRI, A. Md	-	Tenaga Honorer	Diploma
28	VIDI LEONARDO	-	Tenaga Honorer	SLTA

Sumber : BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran untuk pencapaian sasaran strategis pada BPBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 adalah dengan pengalokasian awal sebesar Rp. 6.048.903.691,00 yang kemudian diadakan perubahan anggaran menjadi Rp. 5.317.674.226,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.064.180.113,00 atau sebesar 95,23%.

6. Sarana dan Pra sarana

Untuk peralatan dan mesin yang dimiliki BPBD Kabupaten Sambas sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2

Daftar Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No.	Nama Barang	Jumlah		Ket.
		APBD	APBN	
1	2	3	4	5
1.	Mobil Pick Up	1		Unit
2.	Mobil Dinas Pejabat (Station Wagon)	1		Unit
3.	Mobil Rescue	1		Unit
4.	Sepeda Motor	10		Unit

5.	Lemari Besi/Metal	5		Buah
6.	Filling Cabinet Besi	2		Buah
7.	Rak Buku (Lemari Display)	2		Buah
8.	Lemari Arsip (Lemari Katalog)	4		Buah
9.	Mesin Absensi	1		Unit
10.	LCD Projector/Infocus	1		Unit
11.	Papan Pengumuman	1		Unit
12.	Meja Kerja ½ Biro	13		Buah
13.	Kursi Rapat	66		Buah
14.	Kursi Putar	7		Buah
15.	Mesin Potong Rumput	1		Buah
16.	Lemari Es	1		Unit
17.	AC	12		Unit
18.	Televisi	1		Unit
19.	Loudspeaker	1		Unit
20.	Microphone Table Stand	1		Unit
21.	Pompa Air	12		Buah
22.	Tripod/Stand Loudspeaker	1		Unit
23.	Alat Pemadam	4		Buah
24.	Pompa Kebakaran	4		Buah
25.	Nozzel	2		Buah
26.	Selang	9		Buah
27.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1		Buah
28.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5		Buah
29.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	9		Buah
30.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10		Buah
31.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	12		Buah
32.	Kursi Hadap	10		Buah
33.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Esselon II	1		Set
34.	Audio Mixing Consule	1		Unit
35.	Microphone/Wireless MIC	1		Unit
36.	Power Amplifier	1		Unit
37.	Speaker Control	1		Unit
38.	Rak Peralatan Studio Video	1		Buah
39.	Handy Talky (HT)	5		Unit
40.	Komputer PC	11		Unit

41.	Laptop	8		Unit
42.	Printer	9		Unit
43.	Stabilizer/UPS	2		Unit
44.	Tenda Pleton	7		Buah

Sumber : BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Oleh karena kelengkapan sarana dan pra sarana juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan support/dukungan baik dari segi alokasi anggaran maupun penyediaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang handal dan memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana guna mendukung kinerja BPBD Kabupaten Sambas ke depan.

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, BPBD Kabupaten Sambas masih memerlukan dalam hal sarana dan pra sarana pendukung kerja seperti gudang arsip dan Peralatan, ruang pertemuan, garasi, sarana mobilitas/kendaraan, audio visual, perlengkapan kantor dan lain-lain.

B. Permasalahan Utama

Sejalan dengan upaya perlindungan masyarakat terhadap bencana dan kebakaran di Kabupaten Sambas, maka keberadaan BPBD Kabupaten Sambas di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih terlindungi dan mantap. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi perlindungan masyarakat terhadap bencana dan kebakaran apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang pada akhirnya berakibat akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas sebagai daerah otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, antara lain:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.
2. Terbatasnya fasilitas operasional dalam melaksanakan tugas.

3. Masih terbatasnya peralatan kebencanaan yang dapat digunakan sebagai deteksi dini bencana di Kabupaten Sambas.
4. Belum maksimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran.
5. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran.
6. Belum maksimalnya penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub urusan bencana dan kebakaran yang telah ditetapkan pemerintah.
7. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur penanggulangan bencana dan kebakaran yang terlatih baik dari unsur aparatur BPBD maupun masyarakat.
8. Belum tersedianya pembiayaan yang memadai dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Sambas pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana strategis ini disusun dengan menggabungkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang meliputi penetapan tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholders*, *internal bussiness process*, *learning* dan *growth* serta *finacials* sehingga mampu memenuhi keinginan *stakeholder* untuk bisa mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan di masa depan, membangun operasi serta prosedur dalam mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya dengan menggunakan lima tolak ukur, antara lain masukan (*inputs*), *output* (keluaran), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) serta dampak (*impacts*).

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi pembangunan daerah hanya dapat direalisasikan dalam bentuk misi pembangunan daerah yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan kedalam tujuan serta sasaran strategis BPBD Kabupaten Sambas berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi khusus yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Sambas dalam konsepsi yang lebih operasional dalam suatu strategi. Perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program kegiatan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strateginya.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sambas disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan serta prioritas daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan juga disertai dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang

berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan. Kondisi ini diperlukan agar mampu beradaptasi serta merespon terhadap suatu perkembangan yang begitu dinamis, baik pada aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Atas dasar pertimbangan visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006-2011), lima tahun kedua (tahun 2011-2016) dan lima tahun ketiga (tahun 2016-2021) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah, dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

1. Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani);
2. Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi;
3. Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah);
4. Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu);
5. Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat);
6. Program *E-Government*;
7. Program Pelayan Diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan);
8. Program Pemuda Siap Kerja; dan
9. Program *Green Growth* (Program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPBD Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-5, yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2021 - 2026 haruslah sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Kabupaten Sambas yang merupakan sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026 adalah **Terwujudnya Sambas Kabupaten Tangguh Bencana.**

Sasaran strategis BPBD Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis daerah serta menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran perangkat daerah, yaitu :

1. Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana;
2. Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pelayanan Publik.

Tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026, yaitu pada :

Misi 5 : Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Kejadian Bencana
2. Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten
3. Persentase Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kabupaten

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Sambas merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara Bupati Sambas dengan Kepala BPBD Kabupaten Sambas untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPBD Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana	1. Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100%
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran	1. Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten	75%
		2. Persentase Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kabupaten	75%

Total anggaran BPBD Kabupaten Sambas yang bersumber dari APBD dan dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis, yaitu :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.760.680.153,00	(APBD) DAU 100%
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.416.777.846,00	(APBD) DAU 100%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.140.216.227,00	(APBD) DAU 100%
Jumlah		Rp. 5.317.674.226,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

BPBD Kabupaten Sambas telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Sambas tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil data tersebut dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Sambas dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis capaian kinerja yang dilakukan untuk sasaran strategis BPBD Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100%	85,22%	85,22%
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten	75%	100%	100%
		Persentase Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kabupaten	75%	100%	100%

Berdasarkan indikator yang memperlihatkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan berhasil. Keberhasilan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas dapat juga dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam melaksanakan program kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian kinerja Th 2024
			Target Th 2024	Realisasi Th 2024	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.416.777.846,00	1.207.391.940 ,00	85,22	85,22
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.140.216.227,00	1.140.216.161,00	100%	100%

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

a) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah :

1. Program Penanggulangan Bencana, terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja 100%,
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi capaian kinerja 55,98%,
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan realisasi capaian kinerja 84,10%.
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan realisasi capaian kinerja 99,99%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja 100%,

- b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan realisasi capaian kinerja 100%,
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan realisasi capaian kinerja 100%.
1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100%	97,20%	97,20%	100%	85,22 %	85,22 %
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten	75%	57,14%	57,14%	75%	100 %	100 %
		Persentase Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kabupaten	75%	100%	100%	75%	100 %	100 %

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen rencana strategis.

Tabel 3.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Kinerja		Target akhir RPJMD
			Th n-1	Th n	
1	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	97,20%	85,22%	100%
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten	57,14%	100 %	85%
		Persentase Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kabupaten	100%	100 %	85%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan

Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sambas bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran strategis yang ditetapkan, 6 (enam) indikator sasaran strategis mendapat capaian Sangat Baik (SB). Dengan membandingkan capaian keberhasilan pada jumlah indikator Sasaran Strategis yang ada maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Sambas pada Tahun 2024 adalah sebesar **95,23%** dapat dikatakan **Sangat Baik (SB)**.

Penjelasan pencapaian setiap indikator sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dengan membandingkan jumlah realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun dengan target jumlah anggaran yang tersusun. Selama tahun 2024, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.716.572.012,00 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp. 2.760.680.153,00. Sehingga capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan adalah 98,40%.

Masalah dan kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan masih terdapat beberapa masalah dan kendala, antara lain :

- Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan, karena dari jumlah anggaran sebesar

- Rp. 2.716.572.012,00 juga termasuk didalamnya anggaran untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.880.263.146,00.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas dikarenakan kurangnya personil ASN di BPBD Kabupaten Sambas.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan antara lain dilakukan :

- Mengupayakan mendapat dukungan anggaran/pendanaan untuk efektifitas penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dan
- Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Kejadian Bencana dengan realisasi sebesar 85,22%, didapatkan hasil dari indikator sub kegiatan sebagai berikut :

- 1 (satu) Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi, sampai menjadi Dokumen Kajian Risiko Bencana,
- 748 Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya,
- 1 (SATU) Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, sampai menjadi Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Korban Bencana dengan 1 Orang Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana,

- 1.535 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik
- 2 (dua) Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan realisasi sebesar 99,99 %, didapatkan hasil dari indikator sub kegiatan berupa 1 (satu) Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

- b. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari : Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran dan Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Response Time. Dilihat dari jumlah realisasi anggaran pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran selama 1 (satu) tahun dengan target jumlah anggaran yang tersusun, selama tahun 2023 terealisasi dengan persentase 100% . Untuk Capaian Indikator Kinerja Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran dengan realisasi sebesar 100%, didapatkan hasil dari indikator sub kegiatan yaitu
- Pelayanan Pemadaman/ Penyelamatan 32 Orang warga terdampak kebakaran
 - 10 Pelayanan Waktu Tanggap response time 15 menit sejak diterimanya informasi

Masalah dan kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana dan Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran terdapat beberapa masalah dan kendala, yaitu :

- Benturan aturan pendukung yang bersifat teknis mengakibatkan tema penanggulangan bencana belum menjadi “mandat pokok”

pendanaan, sehingga pendanaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di daerah tidak masuk dalam prioritas utama;

- Masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten, OPD, Intansi serta Lembaga terkait kebencanaan pada saat terjadinya bencana;
- Belum tersedianya tempat penyimpanan atau gudang yang sesuai standar untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Kurangnya pemahaman warga masyarakat dalam penerapan pelaksanaan informasi kebencanaan;
- Bantuan yang disalurkan masih jauh dari keinginan dan kemampuan jika dilihat dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan kebakaran, oleh karenanya perlu perencanaan kajian kebutuhan pasca bencana;
- Luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani pemadam kebakaran tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam yang tersedia;
- Meski kecepatan waktu tanggap dapat dicapai, akan tetapi waktu penyelesaian pengendalian kebakaran masih relative lama sehingga semakin memperluas wilayah/daerah potensi kebakaran; dan
- Terbatasnya personil/petugas yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam penanganan bencana dan kebakaran.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Bencana dan Meningkatkan Kewaspadaan Dini dan Perlindungan terhadap Kebakaran antara lain dilakukan dengan :

- Pengalokasian pembiayaan sarana dan prasarana dalam APBD untuk meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyediaan tempat penyimpanan atau gudang yang memadai untuk penempatan sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Memberikan sosialisasi penyebaran informasi kebencanaan kepada warga masyarakat secara rutin dan berkesinambungan pada wilayah yang rawan bencana.
- Menambah personil dan meningkatkan kemampuan personil/tenaga dalam pengendalian bencana dan kebakaran melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peralatan kebencanaan.
- Peningkatan kemampuan dan kapasitas peralatan kebencanaan melalui pengadaan peralatan yang baru dan penganggaran pemeliharaan berkala peralatan kebencanaan.
- Kepala Desa atau Kecamatan (warga) menginformasikan secara cepat dan tepat jika terjadi bencana dan kebakaran di wilayahnya dan membuat laporan tertulis untuk memudahkan penanganan dan pemberian bantuan.
- Membuat kajian kebutuhan pasca bencana terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kebakaran untuk memastikan ketepatan dalam pemberian bantuan.
- Pengalokasian pembiayaan yang memadai untuk penyaluran bantuan bencana dan kebakaran serta pengadaan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
- Meminta laporan yang cepat dan tepat dari lokasi kejadian bencana kebakaran dari pihak terkait terutama Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk tindaklanjut segera, baik lisan maupun tertulis.
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana kebakaran baik secara horizontal maupun vertikal melalui satu komando dan koordinator (BPBD Kabupaten Sambas).
- Meski kecepatan waktu tanggap dapat dicapai, akan tetapi waktu penyelesaian pengendalian kebakaran masih relative lama sehingga semakin memperluas wilayah/daerah potensi kebakaran.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan dan pendidikan pemadam kebakaran terutama teknik dan tata cara pengendalian api secara cepat.
- Perlunya penetapan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan pengolahan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana dalam bentuk Peraturan Bupati atau sejenisnya.

- Peningkatan kapasitas dan kemampuan personil dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan khusus kajian kebutuhan pasca bencana.

B. Realisasi Anggaran

BPBD Kabupaten Sambas memperoleh alokasi anggaran sepenuhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 dengan pengalokasian awal sebesar Rp. 6.048.903.691,00 yang kemudian diadakan perubahan anggaran menjadi Rp. 5.317.674.226,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.064.180.113,00 atau sebesar 95,23%.

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran
BPBD Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.760.680.153,00	2.716.572.012,00	98,40
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.263.962,00	34.263.962,00	100
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.999.802,00	5.999.802,00	100
		3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.999.324,00	5.999.324,00	100
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.319.917,00	8.319.917,00	100
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.880.263.146,00	1.850.921.594,00	98,44
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.550.000,00	63.550.000,00	100
		3 Koordinasi dan	23.929.644,00	23.929.644,00	100

				Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.659.465,00	8.659.465,00	100
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.999.772,00	5.999.772,00	100
	4	Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fugsi	2.750.000,00	1.250.000,00	45,45
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.671.350,00	6.671.350,00	100
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.969.800,00	4.969.800,00	100
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.906.954,00	55.906.954,00	100
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.370.847,00	41.370.847,00	100
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.380.000,00	76,67
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.522.000,00	241.283.300,00	99,49
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.338.600,00	2.338.600,00	100
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.257.450,00	42.185.140,00	95,32
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.018.120,00	224.085.891,00	99,59
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.470.000,00	72.866.650,00	89,44
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.232.250,00	92,32
II	PROGRAM PENANGGULANGAN				1.416.777.846,00	1.207.391.940,00	99,98

BENCANA							
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	76.499.923,00	76.499.923,00	100
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	72.117.179,00	57.349.679,00	79,52
			2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	143.499.898,00	63.343.898,00	44,14
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	132.244.463,00	87.637.766,00	66,27
			2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	474.873.097,00	463.363.097,00	97,58
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	112.555.041,00	52.244.694,00	48,19
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JI TUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	104.988.283,00	104.979.483,00	99,99
			2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	299.999.962,00	299.973.400,00	99,99
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.140.216.227,00	1.140.216.161,00	100
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.417.324,00	22.417.324,00	100

	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	27.787.363,00	27.787.297,00	100
	3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.699.781,00	20.699.781,00	100
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	22.086.311,00	22.086.311,00	100
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	1.047.225.448,00	1.047.225.448,00	100
JUMLAH TOTAL					5.317.674.226,00	5.064.180.113,00	95,23

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Laporan ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sambas kepada publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga tetap perlu menjaga kinerja untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas output / hasil kerja.

Demikian Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Sambas, Februari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sambas,



MAF JUNI, S.P.
Pewakta Utama Muda / (IV/c)
NIP. 1980612 199710 1 001